

DARI KONFRONTASI SAMPAI REKONSILIASI: STUDI KASUS KONFLIK MUHAMMADIYAH DENGAN PKI DI KOTAGEDE TAHUN 1950-1970

Erik Muhammad R.

Mahasiswa Magister di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia
erik.muhammad@ui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini diorientasikan untuk mengetahui sejarah Muhammadiyah di Kotagede antara tahun 1950-1970. Sepanjang tahun 1950-1970 Muhammadiyah di Kotagede banyak mengalami berbagai peristiwa penting, terutama peristiwa yang berkaitan dengan unsur konflik politis antara Muhammadiyah dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Puncak konflik dua kelompok masa tersebut terjadi pada tahun 1950-1965 di Kotagede Yogyakarta, konflik tersebut dipicu oleh persaingan ekonomi, politik, dan soal kepercayaan yang berakhir penahanan orang-orang PKI karena terlibat kasus gerakan G30 S tahun 1965. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah kritis, yang terdiri dari : (1) *Heuristik* (Pencarian Sumber), (2) *Kritik* (kritik atau verifikasi data), (3) *Interpretasi* (Kemampuan menafsirkan sejarah yang berlandaskan pada teknik *Accepted History*), (4) *Historiografi* (Rekonstruksi/ penulisan sejarah). Adapun sumber yang kami peroleh merupakan sumber primer dan sekunder yang termuat dalam buku, jurnal, wawancara, majalah dan arsip. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada awal tahun 1970 selesai operasi militer berlangsung, Muhammadiyah mencoba untuk melakukan rekonsiliasi dan pembinaan secara sosial terhadap orang-orang PKI, antara lain: kepada anak-anak PKI yang ditinggal oleh orang tua karena terjerat peristiwa G30 S 1965, dan keterlibatan Muhammadiyah dalam menyantuni orang-orang mantan PKI untuk ikut bergabung dalam keorganisasian pemuda Muhammadiyah “Nasyi atul Aisyiyah”.

Kata Kunci: Konfrontasi, Rekonsiliasi, Muhammadiyah, PKI, Kotagede

Abstract

This paper aims to understand Muhammadiyah role in Kotagede in 1950 -1970. Between 1950 - 1970 Muhammadiyah experienced so many important occurrences, especially political confrontation and or conflict with Partai Komunis Indonesia (PKI). The conflict increased between 1950 - 1965 caused by economy, politics and religious or belief factors. Using social and political approaches, this study also employs history method which consists of for steps i.e: (1) heuristic; (2) source criticism; (3) interpretation; (4) historiography. The results show that post military operation towards PKI in 1970, Muhammadiyah member in Kotagede tried to use reconciliation method to PKI ex-participants. For example, helping children whom its parents had involved in PKI movements and sosio-religious coaching to PKI ex-convict, on of them pioneered by Nasyiatul Aisyiyah as a part of Muhammadiyah organization which focuses on young women members.

Keywords: Confrontation, Reconciliation, Muhammadiyah, PKI, Kotagede

PENDAHULUAN

Konflik PKI dan Muhammadiyah di Kotagede bermula pada tahun 1950. Pertikaian-pertikaian awalnya disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang ideologi orang-orang Muhammadiyah dengan PKI. Selain itu disebabkan faktor ekonomi kala itu industri kerajinan perak di Kotagede sedang mencoba bangkit lagi. Jumlah buruh kerajinan perak meningkat lagi selama dekade 1950-an. Kelompok inilah yang diman-faatkan oleh PKI dan Masyumi untuk menggaet anggota. Menurut Mutiah Amini, hanya dua organisasi buruh yang mengakar kuat di Kotagede pasca-revolusi, yaitu Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang berafiliasi dengan PKI dan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) yang berafiliasi dengan Masyumi. Menurut Nakamura, gesekan antara Muhammadiyah dan PKI kala itu terjadi karena disebabkan oleh perbedaan pilihan politik dan soal keagamaan (Tirto.id/seja_rah-kotagede-pra-1965-kurusetra-pki-dan-muhammadiyah-dcl4, diakses 3 November 2019).

Konflik selanjutnya terjadi ketika awal pemilu tahun 1955 berlangsung. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang terlaksana dengan baik sepanjang sejarah berdirinya sistem demokrasi di Indonesia. Partai-partai politik yang mengisi pemilu tahun 1955 datang dari beragam jenis ideologi sekaligus memiliki visi misi yang berbeda, namun dalam pemilu 1955 kemenangan partai politik yang dipercayai oleh rakyat Indonesia terdapat empat partai besar, antara lain yakni: (1) PNI, (2) Masyumi, (3) NU, dan (4) PKI.

Pada 1955, sekitar dua bulan sebelum diselenggarakan pemilu DPR dan Konstituante, Muhammadiyah menyelenggarakan sidang Tanwir 21-24 Juni 1955 sebagai momen kegiatan nasional yang menjadi arena untuk mempertajam instrumen politik yang digunakan dalam pemilu 29 September 1955 untuk DPR dan 15 Desember 1955 untuk Konstituante. Inti yang dibicarakan dalam Tanwir ini adalah menyukkseskan Masyumi dengan menusuk tanda gambar bulan bintang yang menjadi simbol partai (Syarifuddin Jurdi, 2010:127).

Sikap Muhammadiyah didalam politik Pemilu 1955 menunjukkan afiliasi dukungan terhadap parpol agamis, dan Muhammadiyah mengharapkan Masyumi agar bisa maju terpilih, dan memiliki kursi dalam pemerintahan. Agar bisa

mewujudkan harapan, Muhammadiyah sering melakukan kampanye-kampanye tipis yang ditujukan pada Masyumi, salah satu kegigihannya itu akhirnya dihargai dengan berhasilnya Masyumi menjadi partai terpilih kedua setelah PNI. Perolehan kursi Masyumi pada pemilu 1955 sebanyak 57 seperti yang diperoleh PNI, sementara partai-partai Islam lainnya yang memperoleh kursi; NU 45, PSII 8, Perti 4, PPTI 1, dan AKUI 1 (Syarifuddin Jurdi, 2010:127).

Konflik Muhammadiyah dengan PKI memuncak ketika, Presiden Soekarno mengusulkan dibentuk kabinet kaki empat. Muhammadiyah yang bergabung dengan Masyumi menolak pernyataan tersebut karena berseberangan secara politik dengan Partai Komunis Indonesia. Natsir mengungkapkan sejumlah dalil hukum Islam yang menyebut komunisme bertentangan dengan Al-Qur'ann dan hadist. "Jadi apakah mungkin minyak dan air dipersatukan meskipun digodok dan diaduk-aduk," ucap Natsir. Natsir meminta kader Masyumi waspada terhadap politik "menyodorkan tangan" yang palsu dari komunis. Juga hati-hati terhadap "serigala berbulu kibas yang hendak dimasukan sekadang dengan ternak". Pernyataan Natsir yang menentang kabinet kaki empat berakhir begitu saja, pada tahun 1960 Natsir dan kolega Masyumi dijebloskan kepenjara, oleh Soekarno, karena Soekarno mengetahui politik Masyumi yang memiliki hubungan erat dengan Permesta.

Akhirnya Soekarno membubarkan Masyumi karena Masyumi terindikasi terlibat dalam pemberontakan PPRI/ Permesta. Dari peristiwa ini akhirnya Soekarno banyak berdiskusi dengan PKI dan PKI merasa senang, sebab Masyumi sudah dicekal, dan gerak-gerik politik antara Soekarno dan PKI merasa aman tidak ada yang berani menghalangi. PKI banyak memainkan kesempatan dalam politik Demokrasi terpimpin di era pemerintahan Orde Lama (Nugroho Dewanto, dkk., 2011: 61-62).

Menjelang akhir tahun 1965 terjadi peristiwa G30S yang melibatkan Partai Komunis Indonesia terjerembab dalam kasus pembunuhan 7 jenderal di Jakarta, selain itu di Yogyakarta terjadi pula konflik PKI yang menyebabkan terbunuhnya 2 perwira tinggi Angkatan Darat. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh kelompok agama untuk menumpas orang-orang PKI, termasuk Muhammadiyah di Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian historis yang tentunya akan menggunakan metodologi sejarah. Pencarian sumber dilakukan dengan mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Setelah literatur diperoleh, maka akan dilakukan verifikasi dan mengecek ulang kebenaran sumber atau literatur yang ditemukan. Setelah itu sumber-sumber diinterpretasikan. Dalam langkah ke tiga ini analisis dan *imagenasi* peneliti diperlukan untuk membangun kembali peristiwa masa lampau yang telah berserakan. Setelah sumber-sumber dianalisis langkah terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peristiwa panjang sejarah konfrontasi hingga rekonsiliasi antara Muhammadiyah dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kotagede, perlu adanya uraian awal yang berkaitan dengan puncak terjadinya konflik yang paling berpengaruh, diantaranya terjadi pada tahun 1965. Selama tahun 1965 terutama ketika terjadinya Gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan adanya persinggungan sosial antara Muhammadiyah dan PKI di Kotagede.

A. Peristiwa G 30 S 1965 di Yogyakarta

Gerakan 30 September 1965 atau dalam historiografi Indonesia secara umum disingkat dengan akronim G30 S/PKI, berasal dari suatu peristiwa yang diawali oleh sebuah usaha gerakan kup dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dalam peristiwa tersebut banyak mengorbankan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dalam tubuh TNI. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Lubang Buaya, dekat dengan bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Menurut Roosa, Gerakan 30 September selama ini biasa dilukiskan sebagai usaha kudeta. Para penulis yang bersekutu dengan rezim Orde Baru bersikukuh menggunakan istilah ini, seperti misalnya; Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, mereka memberi judul buku mereka dengan "*The Coup Attempt of the "September 30th Movement in Indonesia*", dan Sekretariat Negara memberi anak judul versi bahasa Inggris dari

laporannya tahun 1994 *The Attempt Coup by the Indonesian Communist Party*. Bahkan para Sejarawan yang tidak menyetujui analisis rezim Orde Baru sekalipun menggunakan istilah ini, seperti; Harold Crouch memberi judul bab tentang G30S dalam bukunya berjudul "*The Coup Attempt*" (John Roosa, 2008: 151).

Kejadian kudeta G30 S (yang kemudian bermutasi menjadi Dewan Revolusi) tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tetapi terjadi pula di Yogyakarta, wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Wilayah Yogyakarta dan sekitar Jawa Tengah dapat dikatakan sebagai wilayah basis terbesar kemenangan Partai Komunis Indonesia dalam Pemilu 1955. Di Jawa Tengah PKI memenangkan Pemilu hampir 75 persen suara yang mendukung. hal ini merupakan sebuah prestasi awal kemenangan PKI yang ditunjukkan di dalam Pemilu. Pada awalnya PKI lahir tahun 1920 dan semenjak lahir serta berkembangnya PKI, partai tersebut telah melakukan dua pemberontakan, pertama pada tahun 1926 dan yang kedua pada tahun 1948, dan yang terakhir pada tahun 1965, namun ketiga pemberontakan tersebut dianggap gagal. Melihat kegagalan yang terjadi pada peristiwa di Lubang Buaya Jakarta, keadaan di Yogyakarta mendadak tidak menentu. Yogyakarta sebagai wilayah basis PKI terbesar berencana akan mendukung gerakan G30S dengan melalui pimpinan Biro Khusus Wirjomartono yang berhasil menghimpun suatu kelompok yang setia kepada PKI yang berasal dari golongan lokal (Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, 1989: 37).

1. Kronologi Peristiwa

Pada tanggal 25 September 1965, Wirjomartono diberitahu oleh rekan nya satu partai, Harisantoso, tentang adanya "Dewan Jenderal" dan adanya sekelompok perwira muda yang memusuhi Dewan tersebut. Wirjomartono segera meneruskan informasi ini kepada Sukarman, Kusdiby, dan Bambang Setiadi. Pada sore harinya, Wirjomartono dikunjungi oleh atasannya yaitu Sudjiono, Sekretaris Pertama Komite Partai di Yogyakarta, dan Sudarmo, Kepala Biro Khusus untuk Jawa Tengah. Sudarmo memberikan sepucuk surat kepada Wirjomartono untuk Mayor Wisnuardji, Komandan Batalyon L yang dikerahkan di sebelah Utara Yogyakarta. Wirjomartono cepat-cepat menuju ke Kentungan yaitu tempat Batalyon L mendirikan pos-nya dan menyerahkan surat dari Sudarmo kepada

Wisnuradji. Tujuan surat tersebut untuk memperkenalkan diri kepada Wisnuradji (Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, 1989: 37).

Dua hari kemudian, Wirjomartono memberi pengarahan pada beberapa orang pengikutnya Kapten Sumarjo (Purnawirawan) dan Tambeng (Kom. Kompi Batalyon C Korem 72), Letnan satu Djaenal, Kopral Sumitro, Sersan dua Sumedi, dan Sersan satu Mudjono. Setelah memberikan gambaran tentang situasi Wirjomartono meminta kepada orang-orang yang hadir tersebut untuk tinggal di kota sampai 1 Oktober 1965. Pada hari yang sama, Wirjomartono dikunjungi Mayor Muljono di kediamannya dan mem-beritahukan tentang Dewan Jenderal, serta adanya perwira muda lapangan yang tidak menyenangkan Dewan Jenderal, Muljono menegaskan perlunya mendukung kelompok yang disebut terakhir itu. Ia menerangkan, bahwa untuk membantu perwira-perwira itu, mereka perlu menyingkirkan Komandan Korem 72, Kolonel Katamso dari kedudukannya. Ia juga menyatakan bahwa pasukan-pasukan bersahabat yang mereka andalkan di daerah itu, meliputi Batalyon Wisnuradji, satu kompi Batalyon C di bawah pimpinan Kapten Tambeng, dua kompi pejuang veteran di bawah Mayor Daenuri dan 800 orang anggota Pemuda Rakyat yang telah mendapatkan latihan militer di Sleman dan Kotagede (Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, 1989: 37). Wirjomartono dan Wisnuradji menginstruksikan Muljono untuk bertindak melawan Dewan Jenderal jika waktu yang direncanakan sudah tiba dan bersiap-siap menghadapi peristiwa yang akan terjadi.

Pada pagi hari 1 Oktober 1965, saat mendengar berita tentang “Gerakan 30 September” dari Jakarta, Kol. Katamso mengumpulkan anggota-anggota stafnya untuk menerima pengarahan tentang keadaan tersebut. Dalam pengarahannya, Kol. Katamso menyatakan bahwa ia tidak percaya pada apa yang disebutkan dalam pengumuman tersebut, maka komandonya menyatakan tetap setia kepada Presiden. Katamso melarang pers dan radio menyebarluaskan informasi yang berasal dari gerakan tersebut. Pada pukul 3. 00 sore hari, Wirjomartono mengirim kan kurir; Letnan dua Senen meng-hadap pada Kapten Sukarman dengan pesan yang harus disampaikan kepada Mayor Mulyono, yakni supaya Muljono membentuk Dewan Revolusi di Yogyakarta dan mengangkat Wirjomartono sebagai ketua, maka

dengan itu May. Mulyono harus menyingkirkan Kom. Korem 72 yakni Kol. Katamso. Pukul 6.00 sore pada tanggal 1 Oktober 1965 Batalyon L Wisnuradji menculik Kol. Katamso dari rumahnya dan menciduk Stafnya, Letkol. Sugijono dari Markas Komando. Mereka berdua dibawa ke kesatrian batalyon di Kentungan, sebuah desa disebelah Utara Yogyakarta. Penculikan tersebut dipimpin oleh Letnan satu Sumardi yakni sebagai Perwira Intelejen Batalyon L. Keesokan hari, pukul 2.00 dini hari, Letnan Sumardi memerintahkan anggota-anggota seksi di bawah pimpinan Letnan dua Kamil, untuk membunuh kedua perwira tersebut, Kol. Katamso dan Letkol Sugijono. Mereka digiring menuju sebuah lubang yang sebelumnya telah digali, kemudian leher mereka dililit dengan kawat, lalu kepala mereka dipukul dengan gagang mortir, lalu mereka berdua dibenamkan bersama-sama dalam lubang tersebut (Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, 1989: 40).

2. Kegagalan Gerakan 30 September 1965 dan Aksi Penangkapan Pelaku dalam Tubuh TNI di Yogyakarta

Sejarah mencatat nama para pentolan Partai Komunis Indonesia Muso, Syarifudin, Dipa Nusantara Aidit, MH Lukman, Njoto dengan tinta hitam karena mereka berbeda ideologi dengan pemerintah yang sah. Dua kali pemberontakan komunis berakhir dengan kegagalan. Tahun 1948 di Madiun pemberontakan komunis langsung dihancurkan pasukan gabungan tentara Soekarno. Percobaan pemberontakan tahun 1965 pun kembali menemui kegagalan. Kali ini bahkan lebih tragis, jutaan kader dan anggota PKI ditumpas habis Jenderal Soeharto. Maka nasib para petinggi partai merah ini pun hampir selalu bernasib tragis. Dipa Nusantara (DN) Aidit langsung melarikan diri dari Jakarta saat Gerakan 30 September 1965 gagal. Aidit lari ke daerah basis PKI di Yogyakarta. Aidit lalu berkeliling ke Semarang dan Solo. Aidit ditangkap pasukan Brigade Infantri IV Kostrad di kampung dekat Stasiun Solo Balapan. Aidit adalah tokoh besar. Tidak akan terbayang zaman ini orang semacam Aidit di Indonesia. Ia adalah pemimpin Partai Komunis nomor tiga di seluruh dunia (Prakoso, D. A. H. A, 2015).

Di Yogyakarta penangkapan terhadap pelaku dari G30 S/ PKI dilakukan dengan cara represif. Peristiwa ini berawal pada tanggal 3 Oktober 1965 ketika diketahui bahwa usaha “Gerakan 30 September” telah gagal di beberapa tempat,

Wirjomartano mendatangi Mayor Muljono dan berusaha membujuknya untuk mempertahankan kedudukan Gerakan di Yogyakarta. Namun Muljono sudah putus asa, dan merencanakan untuk kabur. Setelah kabur pentolan oknum Angkatan Darat ini kemudian ditangkap di Boyolali (Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, 1989: 42).

B. Pasca Peristiwa G30 S 1965 di Yogyakarta

Pasca meletusnya Gerakan 30 September 1965, di Yogyakarta mengalami banyak situasi yang mencekam. Situasi semakin memburuk ketika beberapa media masa telah diambil alih oleh kelompok anti Gerakan 30 September 1965 melalui pengumuman radio dari Jakarta, dan disiarkan ke beberapa wilayah hingga Yogyakarta. Situasi mencekam tersebut tidak hanya terjadi di Yogyakarta, akan tetapi terjadi juga wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Di Jawa Tengah Pimpinan Kodam VII/ Diponegoro sempat di ambil alih oleh Kol. Suherman yang menjabat sebagai Ketua Dewan Revolusi Jawa Tengah. Sedangkan pelaksana Gerakan 30 September diserahkan kepada Letkol Usman Sastrodibroto. Akan tetapi sejak tanggal 2 Oktober, Brigjen Surjosumpeno telah dapat mengambil alih kembali pimpinan Kodam VII/ Diponegoro. Dalam perintah tugasnya Brigjen Surjosumpeno menyerukan ketaatan untuk seluruh pasukan Diponegoro, memegang teguh sumpah prajuritnya dan menyerukan kepada pasukan Diponegoro yang pro G30S supaya segera kembali dalam barisan Diponegoro. Adapun Brigjen Surjosumpeno berpidato di dalam radio tanggal 2 Oktober 1965, melalui RRI Semarang menyatakan tidak membenarkan pengumuman-pengumuman dari mantan Kol. Suherman melalui RRI Semarang dan Yogyakarta (*Suara Muhammadiyah*, No. 5-6, 1965: 40).

Di Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 sejak Major Muljono selaku kepala Seksi Korem 72 yang mengambil alih jabatan Korem 72 dari Kol. Katamsa, membawa pada malapetaka di hari berikutnya. Pada pagi 4 Oktober Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam VIII/ Kepala Daerah DIY (Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono ke IX sedang di Jakarta) memberikan pidato di dalam radio yang berisi menyatakan kesetiannya dan ketaatannya kepada Presiden dan

menyerukan supaya rakyat tetap tenang dan waspada dari pejabat-pejabat pemerintahan supaya bekerja seperti biasa. Pagi pada 4 Oktober 1965, Penyiar RRI/TV Yogyakarta menyampaikan sebuah pengumuman supaya para karyawan RRI/TV di Yogyakarta kembali menjalankan tugasnya seperti sediakala. Sejak tanggal 1 Oktober kebanyakan dari karyawan dan pejabat pemerintah tidak berani beraktivitas seperti biasa, sehingga siaran-siaran RRI/TV hanya berupa lagu-lagu hiburan dari piringan hitam dan pembacaan pengumuman dari Mayor Muljono yang dilakukan oleh anggota tentara wilayah Yogyakarta. Sesudah tanggal 2 dan 3 Oktober RRI/TV di Yogyakarta tidak mengadakan hubungan RRI/TV pusat di Jakarta, dan sesudah pada tanggal 3 Oktober 1965 justru siaran RRI/TV menghilang di udara. pada tanggal 4 Oktober baru RRI/TV di Yogyakarta mengadakan siaran kembali dan berhubungan dengan RRI/TV pusat di Jakarta (*Suara Muhammadiyah*, No. 5-6, 1965: 40).

Adapun Melalui RRI di Yogyakarta Surjotomo selaku Perwira Staf Kodam VII Diponegoro bertindak sebagai utusan dari Kodam VII Diponegoro, sesuai dengan telegram dari Pangdam VII/ Diponegoro, menyatakan bahwa mulai tanggal 4 Oktober 1965 pukul 07.00 Korem 72 telah kembali pada jalan yang benar. Keadaan Penduduk dan Masyarakat sehari-hari umumnya menampakkan wajah tenang-tenang saja, akan tetapi batinnya pasti bertanya-tanya dan menghendaki segera adanya penyelesaian. Peristiwa yang terasa selama ini ialah keadaan bahan-bahan makanan (sembako) meningkat harganya secara drastis. Sementara itu pada tanggal 2 Oktober 1965 sore telah diadakan suatu demonstrasi yang bergerak mulai dari Lapangan militer Panembahan Senopati melalui Malioboro dan sampai ke Korem 72 di jalan Panglima Sudirman. Demonstrasi tersebut banyak meneriakan yel-yel yang berisi ganyangan kepada Dewan Jenderal. Sedang ditembok-tembok dan pohon banyak dipasang plakat-plakat yang bertuliskan “Ganjang Dewan Djenderal Hidup Dewan Revolusi”. Disamping itu ada juga yang berbunyi “Ganjang Setan Desa dan Setan Kota”. Pawai demonstrasi tersebut tidak membawa nama sesuatu partai atau organisasi dan golongan tertentu, akan tetapi masyarakat Yogyakarta mengetahui itu adalah anggota PKI termasuk Pemuda Rakyat, Gerwani dan lainnya (*Suara Muhammadiyah*, No. 5-6, 1965: 40).

Selepas mengidentifikasi siapa yang bertanggungjawab dalam gerakan 30 September 1965, diketahui yang paling terindikasi dalam keterlibatan G30 S ialah PKI. Alasan ini mengacu pada peristiwa di Lubang Buaya Jakarta, terdapat peran Gerwani sebagai *ouderbow* PKI yang terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut. Di Yogyakarta gerakan 30 September 1965 juga demikian, banyak yang mengetahui gerakan ini ditanggung oleh Partai Komunis Indonesia, dimana keterlibatan Pemuda Rakyat yang dipersiapkan untuk *mengganjang* Dewan Jenderal (Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, 1989: 38).

Menjadi berbeda halnya dengan pengakuan PKI di Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah Jawa Tengah sekitarnya, PKI menanggapi bahwa dukungan terhadap dewan jenderal itu merupakan sebuah fitnah. Sudah barang tentu informasi ini berbeda sekali dengan pendapat diatas yang dikutip dari keterangan Nugroho Notosusanto (*Suara Muhammadiyah*, No. 7- 8, 1965: 26).

Akan tetapi pernyataan tersebut (yang dimuat dalam majalah *Suara Muhammadiyah*) ditentang oleh Perwira Penerangan Kodam VII Diponegoro. Ia menganggap bahwa siaran di radio oleh PKI disinyalir adanya dukungan sandiwara terhadap kebijakan presiden. Ia mengatakannya dengan istilah "*lamisan*" atau bisa diartikan sebagai kebohongan. Perwira tersebut menganggap pernyataan di Yogyakarta, dan wilayah Jawa Tengah merupakan hasil tiruan dari pernyataan DPD Sarbupri dan DP SOBSI Jawa Tengah, dua badan ini menyatakan bahwa masalah gerakan 30 September merupakan suatu masalah yang berasal dari masalah intern Angkatan Darat dan orang di luar itu tidak perlu ikut campur. Namun pernyataan dari Perwira tersebut nampaknya benar terjadi, ketika kelompok PKI di Klaten yang ditengarai oleh Pemuda Rakyat melakukan tindakan-tindakan pengacauan, bahkan penculikan dan sempat juga melakukan tindakan pembunuhan terhadap orang-orang yang dipandang sebagai tokoh penentang gerakan 30 September. Anggota-anggota Gerwani yang mendukung dengan cara mendirikan dapur-dapur umum untuk kepentingan anggota satu kelompoknya yakni PKI dan Pemuda Rakyat (*Suara Muhammadiyah*, No. 7- 8, 1965: 35).

Dari beberapa pernyataan diatas, nampaknya PKI benar-benar kelompok yang menentang kedaulatan negara, dan masyarakat mengetahui PKI adalah satu-

satunya kelompok yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965, sehingga masyarakat mulai banyak melakukan tindakan perlawanan terhadap kelompok-kelompok PKI yang berani melakukan kerusuhan. Akan tetapi di Klaten ini pihak ABRI melakukan tindakan yang cepat sehingga keadaan yang berbahaya yang dapat memicu kerusuhan dengan masyarakat dapat segera diatasi dengan cara menangkapi pelaku-pelaku kerusuhan sekaligus dengan menyita senjata-senjata yang akan digunakan dalam kerusuhan. Berhubung dengan kejadian ini berlangsung; kerusuhan di Klaten dan Solo, maka panglima Kodam VII/ Diponegoro telah mengumumkan bahwa di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sedang berada dalam keadaan perang, maka atas dasar itu diberlakukan hukum-hukum militer. Di kota Semarang dan daerah bekas Keresidenan Surakarta termasuk Klaten, telah diadakan jam malam, yang berlaku mulai tanggal 26 Oktober 1965 (*Suara Muhammadiyah*, No. 7- 8, 1965: 35).

C. Respon Muhammadiyah Pasca G30 S/ PKI di Kotagede tahun 1970

Awal terjadinya peristiwa G30 S/PKI respon Muhammadiyah sangatlah intensif. Keadaan ini berdampak baik bagi perkembangan organisasi Muhammadiyah yang semakin maju. Hal ini ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi baru dalam badan Muhammadiyah yang terdiri dari, (1) Nasyiatul Aisyiyah, (2) Pemuda Muhammadiyah, (3) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan (4) Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Keempat organisasi ini kemudian menjadi satu dalam badan semi militer Muhammadiyah yang diberi nama dengan Komando Kesiapsiagaan Anggota Muhammadiyah (KOKAM) (*Suara Muhammadiyah*, No. 10, 1966: 5).

Dengan dibentuknya KOKAM, Muhammadiyah ingin menjaga perjuangan cita-cita Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) yang dimanifestasikan dalam Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) bisa diberlakukan. Perjuangan KOKAM yang diharapkan di atas nampaknya sudah dilaksanakan dengan pengorbanan sekuat tenaga, bahkan untuk mempertahankan Ampera telah banyak terjadi korban gugur dari anggota KOKAM, salah satunya berada di Yogyakarta, antara lain terdiri dari seorang Mahasiswa yakni Hasanudin Noor (Anggota IMM) di Banjarmasin, A

Sjafei siswa SMA Muhammadiyah di Jakarta, Margono siswa SPG Muhammadiyah dan Aris Munandar siswa SMP Muhammadiyah di Yogyakarta. Dengan berakhir gugurnya Aris Munandar dan Margono dalam bentrok mempertahankan Ampera, maka keluarga KAMI dan KAPPI di Yogyakarta yang saat itu memiliki kantor organisasi di Alun-alun Utara Yogyakarta, mengabadikan nama Aris Munandar dan Margono di dalam laskar Ampera Aris Munandar (*Suara Muhammadiyah*, No. 10, 1966: 5).

Dalam suasana pasca terjadinya Gerakan 30 September/ PKI, masyarakat di Yogyakarta semakin waspada. Muhammadiyah tidak mempercayai lagi PKI dan menganggap musuh utama karena oknum-oknum pelaku penyerangan fisik yang mengaku sebagai anggota PKI banyak menimbulkan kerusuhan dengan orang-orang Muhammadiyah, seperti musibah yang telah menimpa M. Moechri korban tewas dikeroyok oleh beberapa orang di Godean yang mengaku sebagai antek-antek PKI (*Suara Muhammadiyah*, No. 1- 2, 1966: 22). Selain itu terdapat pula mahasiswa dan pemuda anggota-anggota organisasi pemuda Muhammadiyah angkatan '66 yang terluka parah akibat diserang oleh gerombolan pemuda yang gelap mata yang terindikasi kena infiltrasi gerilya politik PKI, Pemuda Rakyat, dan CGMI. Pemuda Muhammadiyah tersebut terdiri dari organisasi, KAMI dan KAPPI (*Suara Muhammadiyah*, No. 1- 2, 1965: 22).

Beberapa respon kontra pemerintah Orde Lama dan pengganyangan Gerakan 30 September dilakukan dalam media informasi cetak seperti majalah Suara Muhammadiyah. Di dalam tulisannya sering sekali membuat tuduhan-tuduhan kepada PKI sebagai dalang kerusuhan di tahun 1965 (*Suara Muhammadiyah*, No. 1- 2, 1966: 28).

Masa pemerintahan Orde Lama sudah lama berlalu. Peristiwa gerakan 30 September/ PKI menjadi penyebab utama dari sebuah akhir kekuasaan Orde Lama. Ketika itu Surat Perintah Sebelas Maret adalah kunci mematikan bagi pemerintahan Orde Lama, dan digantikan dengan pemerintahan Orde Baru. Soeharto adalah sang pemenang dalam konstataasi memperebutkan jabatan tertinggi negara untuk menjadi Presiden. Sejak berdirinya Orde Baru, banyak diantara pendukung dari ormas-ormas Islam yang setuju dengan program-program Orde Baru, salah satunya

memiliki visi dan misi untuk memperbaiki keadaan sosial-ekonomi pasca terjadinya peristiwa 1965. Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi sosial yang mendukung kebijakan pemerintah Orde Baru, saat itu Ketua Umum P.P Muhammadiyah dipimpin oleh K.H. A Badawi.

Ketika diadakan Muktamar ke 4 Muhammadiyah, dan musyawarah kerja ke 1 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Jakarta, pada tanggal 14 Nopember 1966, terdapat beberapa tamu undangan istimewa negara yang baru dalam memimpin Indonesia, antara lain yaitu, Presiden Soeharto, Jenderal A.H Nasution, Menteri Utama Adam Malik, Letjend Basuki Rachmat, Mayjend Soetjipto SH, Jenderal Polisi Sutjipto Judohardjo, Ir. M.H Sanusji, Dr. H.M Hatta, Mayjend Amir Machmud, Mayjen KKO Ali Sadikin, KH. A Badawi dan Prof. Dr. Hamka. Mereka diundang oleh Muhammadiyah karena selama ini Muhammadiyah ingin bekerja sama dengan pemerintah Orde Baru dalam mengamalkan ilmu kebaikan “*Amar Makruf Nahi Munkar*”.

Pada tanggal 22 Nopember 1966 yang bertempat di Istora Senayan Jakarta K.H. A Badawi mengamanatkan beberapa poin penting, antara lain ialah, “betapa untungnya organisasi Muhammadiyah dapat bekerjasama dengan pemerintah Orde Baru, karena puncak prestasi yang dapat dirasakan bersama terutama dalam menyelesaikan kasus kerusuhan G30 S/PKI dengan cepat adalah di masa ini”. Selain itu dengan diadakannya Muktamar ini ia juga mengharapkan agar Muhammadiyah bisa terus saling menjaga keutuhan nama baik organisasi dan mampu mengembangkan Muhammadiyah kepada akhir yang lebih baik dari pada hari-hari sebelumnya (Suara Muhammadiyah, Edisi No. 23- 24, 1966: 7).

Jika melihat pada amanat muktamar yang disampaikan oleh K.H. A Badawi sangat mendukung dan menyambut bahagia kehadiran dari pemerintahan Orde Baru yang banyak ditunggu oleh rakyat Indonesia. Muhammadiyah pada masa ini cenderung berpihak kepada pemerintah yang baru. Awalnya Muhammadiyah seperti organisasi masa Islam lainnya yang menentang PKI dan menganggap musuh terberat karena kehadiran PKI dengan ideologi komunis yang dapat menyesatkan.

Perubahan respon terjadi sekitar tahun 1968 -19670, ketika operasi militer penangkapan orang-orang PKI mulai diberhentikan, meskipun kebijakan tersebut

tidak sepenuhnya berhenti. Orang-orang Muhammadiyah mulai memberikan tanggapan yang bersifat menolong orang-orang mantan eks- tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejauh pengetahuan penulis tindakan ini tidak dilakukan oleh keseluruhan organisasi Muhammadiyah yang ada di Indonesia, melainkan hanya terjadi di Yogyakarta, orang-orang Muhammadiyah melakukan respon pertolongan, salah satunya dengan cara menolong orang-orang mantan tahanan politik PKI kembali melakukan aktifitas damai bermasyarakat di lingkungan, dan menyediakan sarana pendidikan untuk anak-anak dari orang tua mantan PKI, salah satunya dapat dilihat di daerah Kotagede, dan Jogokariyan. Berikut uraian hasil wawancara penulis dengan narasumber bapak Ust. Jazir ASP di kediamannya, jalan Jogokariyan Yogyakarta, sebagai sumber sekunder:

Pewawancara: Kemudian untuk menindak lanjuti pertanyaan tadi pak. Apakah kemudian orang-orang Muhammadiyah melindungi orang PKI itu melalui jalur pendidikan?

Narasumber: Iya, betul jadi anak-anak mereka disekolahkan, di SD Muhammadiyah; Joyonegaran, Mangkuyudan, Jogokariyan [.....] di Jogokariyan itu tahun 1968. di Jogokariyan, banyak disini yang ibu atau bapaknya mantan tapol menjadi jamaah mesjid Jogokariyan, sekitar 70 persen jamaah masjid dulunya keluarga Tapol.

Keterangan: [.....] kata atau kalimat yang tidak bisa terdengar secara jelas di rekaman

Selain itu untuk mewujudkan adanya rekonsiliasi, menurut Siti Syamsiatun terdapat kesaksian salah seorang pemimpin Nasyahtul Aisyiyah di Kotagede yang banyak menerima orang-orang bekas tahanan politik PKI dan anak-anaknya untuk ikut bergabung dengan organisasi Muhammadiyah, pasca terjadinya Gestapu. Menurut Siti Syamsiatun anak perempuan dari bekas keluarga PKI tidak akan merasa nyaman untuk bergabung dalam HMI, IMM, atau PII, selain juga karena tidak ada satu pun dari tiga organisasi mahasiswa tersebut yang akan secara sukarela menerima mereka, karena organisasi-organisasi diatas banyak terlibat dalam masalah politik, termasuk usaha mereka menuntut pelarangan PKI dan Gerwani. Sebaliknya, *Nasyiah* tidak menerapkan diskriminasi terhadap bekas keluarga Gerwani. Hasnah seorang pemimpin daerah Nasyahtul Aisyiyah di Yogyakarta pada

1970-an menjelaskan bahwa anak-anak perempuan dari bekas simpatisan Gerwani atau PKI yang melarikan diri dari pembantaian pada akhirnya berlindung dibawah naungan Nasyiah.

KESIMPULAN

Sepanjang tahun 1950- 1965 Muhammadiyah harus mengakui adanya konfrontasi antara Pemuda Muhammadiyah dengan PKI khususnya di Kotagede. Sebelum menginjak tahun 1965, di Kotagede sering terjadi pertikaian antara orang-orang Muhammadiyah dengan orang-orang PKI. Persinggungan tersebut terutama dilakukan oleh para pemuda. Dari pihak PKI, para pemudanya direpresentasikan oleh Pemuda Rakyat, sedangkan dari Muhammadiyah diwakili oleh Pemuda Muhammadiyah. Seringkali dalam kegiatan-kegiatan pemuda yang menyangkut kegiatan masyarakat seperti peringatan hari besar, baik hari raya Islam maupun hari nasional, terjadi semacam persaingan. Pihak Pemuda Rakyat sering menyaingi atau membuat hal-hal yang dimaksudkan untuk mengganggu atau menanggalkan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah. Aktifitas yang dimaksudkan adalah untuk mengganggu dan itu biasanya tidak agresif. Tidak ada aksi penyerangan atau apapun yang dapat menyebabkan korban, hanya mengganggu atau mengintimidasi kelompok pengajian. Misalnya saja, orang-orang yang mau datang ke pengajian dicegat supaya tidak jadi ikut. Meskipun secara psikologis terdapat persaingan antara kelompok Pemuda Rakyat dan kelompok Pemuda Muhammadiyah, tetapi tidak pernah terjadi bentrokan fisik atau tindakan kekerasan.

Meskipun sering terjadi konfrontasi antar Pemuda Muhammadiyah dengan Pemuda Rakyat, Muhammadiyah selalu menerima dan menyikapi perkara tersebut dengan *legowo*. Bahkan pasca terjadinya peristiwa 1965 dan pembebasan orang-orang mantan tahanan politik PKI yang dikembalikan kepada keluarga ditempat asalnya, orang-orang Muhammadiyah menerima seperti halnya kehidupan bermasyarakat. Dari Muhammadiyah sendiri memang tidak ada semacam surat resmi yang menolak keberadaan PKI. Tapi jelas bahwa semuanya terutama masyarakat Islam di Kotagede yang mayoritas Muhammadiyah tidak bisa

menerima [keberadaan PKI]. Tapi tampaknya nggak ada [surat resmi semacam itu]. resmi yang menolak keberadaan PKI. Muhammadiyah sendiri kerjasamanya bagus dalam upaya menanggulangi ataupun menanggapi G30S. “

Dapat dilihat bahwa Informan memberikan informasi layaknya masyarakat yang menolak keberadaan PKI akan tetapi indikasi organisasi Muhammadiyah menerima orang-orang bekas tahanan politik PKI untuk hidup dan menjalankan aktifitas bermasyarakat sehari-hari seperti biasa, bukanlah menjadi hal yang dilarang.

Selain itu Muhammadiyah mencoba melakukan rekonsiliasi dengan orang-orang bekas tahanan politik PKI melalui kelompok perempuan Muhammadiyah Nasyiatul Aisyiyah. Nasyiatul Aisyiyah sangat aktif mengajak bekas tahanan politik PKI yang pada saat itu aktif di Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) supaya kembali bersyahadat dan kembali pada ajaran Islam. Semuanya dari mantan tahanan ini akan diberi pembinaan dan akan disantuni sebagaimana masyarakat umum, akan tetapi bagi mereka yang masih ada sikap memusuhi pada Muhammadiyah, biasanya akan dikoordinasikan dengan aparat pemerintah, supaya jangan sampai mereka yang masih berpegang pada idealisme PKI, tetap dibiarkan. Adapun biasanya dalam cara pendekatan Islamisasi yang dilakukan oleh Aisyiyah adalah secara personal dengan cara mendekati anggota yang aktif di Muhammadiyah dan memiliki keluarga bekas tahanan politik, untuk diajak aktif di Nasyiatul Aisyiyah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Baskara T. Wardaya, Dkk., *Suara Dibalik Prahara: Berbagai Narasi tentang Tragedi '65*, Yogyakarta: Galang Press, 2011.

Nugroho Dewanto, Dkk., *Natsir Politik Santun Diantara Dua Rezim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011.

Nugroho Notosusanto, *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30 S/ PKI di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1989.

Roosa John. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*. Jakarta: Hasta Mitra, 2008.

Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966- 2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Majalah

Suara Muhammadiyah, *Muhammadiyah dan Politik*, , Edisi No. 1- 2, th. 38, Djanuari 1966.

Suara Muhammadiyah, *Lembaga Penjemaian Bibit Muhammadiyah*, Edisi, No. 10, th 38, Mei 1966.

Suara Muhammadiyah, *Pedoman PP Muhammadiyah, Ulang Tahun Muhammadiyah ke- 53: Perkuat Orgnisasi Bantu ABRI Tumpas Gestapu Keakar2nja*, Edisi No. 7- 8, th. 37, Oktober/ Nopember 1965.

Suara Muhammadiyah, *Perintah Harian PP Muhammadiyah: Apel Siaga dan Pawai Angkatan Muda Muhammadiyah*, Edisi No. Edisi No. 1- 2, th. 38, Djanuari 1966.

Suara Muhammadiyah, *Sjukur Bung Karno Mendjadi Pengajom Agung*, Edisi No. 5-6, Th. 37, September- Oktober 1965.

Suara Muhammadiyah, *“Utamakan Kekokohan Muhammadiyah dalam Membina Orde Baru”*, Edisi No. 23- 24, th.46, 1966.

Jurnal

Prakoso, D. A. H. A. “Dampak Pemberontakan PKI di Jawa Tengah pada Tahun 19-65”. Dalam *Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta*, Vol.20, No.2, Tahun 2015.